

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2019 mendeskripsikan jika dana desa merupakan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat perhitungan pemasukan serta berbelanja wilayah kabupaten atau kota serta dipakai guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat.²³

Sumber dana desa antara lain:

- a. Pemasukan asli dusun.
- b. Anggaran Dusun dari APBN.
- c. Beberapa hasil PDRD Kabupaten atau Kota.
- d. Peruntukan Anggaran Dusun dari Kabupaten atau Kota.
- e. Dorongan finansial dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten atau Kota.
- f. Sumbangan serta Kontribusi Pihak Ketiga.
- g. Pemasukan dusun yang lain yang sah.²⁴

²³Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN," *Pemerintah RI*, 2016. h, 3

²⁴Dkk Lukman Adi Santoso, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, ed. Call Center Dering DJPK (Jakarta Pusat, 2017). h. 12

2. Tujuan Dana Desa

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, desa mempunyai wewenang untuk menata serta mengurus sendiri kewenangannya sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya anggaran desa akan dipakai guna mendanai kewenangan umum desa sesuai dengan keinginan serta prioritas anggaran desa. Peruntukan dana desa dimaksudkan untuk mendanai program pemerintah desa dalam melakukan aktivitas pemerintahan, meningkatkan serta memberdayakan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah selaku berikut:

- a. tingkatkan jasa khalayak di dusun.
- b. mengentaskan kekurangan serta kesenjangan.
- c. memajukan perekonomian dusun serta warga, lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- d. menanggulangi kesenjangan pembangunan dampingi dusun.
- e. menguatkan warga dusun selaku subyek pembangunan.²⁵

Pemakaian dana dari desa sendiri diatur dalam Permendes Nomor. 19 Tahun 2017, dana desa merupakan anggaran APBN yang diperuntukkan untuk dusun yang ditransfer lewat APBD Kabupaten atau Kota serta diprioritaskan buat penerapan pembangunan alat serta infrastruktur dan pemberdayaan warga dusun. Pemakaian anggaran dusun ialah hak penguasa dusun, tetapi buat memantau serta menjamin tercapainya tujuan

²⁵Lukman Adi Santoso. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, ed. Call Center Dering DJPK (Jakarta Pusat, 2017)..h, 42

pembangunan dusun, penguasa memutuskan prioritas pemakaian anggaran dusun tiap tahunnya.

3. Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pengurusan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa.²⁶ Yamulia berpendapat bahwa, pengelolaan anggaran desa selanjutnya:

a. Perencanaan

Dana Desa ialah salah satu pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya berintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh sebab itu kategorisasi pemograman program serta aktivitas dilakukan dengan melangsungkan konferensi pemograman serta pembangunan Desa terlebih dulu yang mengaitkan BPD, LPMD serta figur masyarakat, dan perwakilan dari unsur warga yang sama. Yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berisi evaluasi dari tahun sebelumnya yang akan diberlakukan dalam kurun waktu satu tahun kedepan RKPdesa ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). RAPBDesa ini kemudian diusulkan keperintah kabupaten/kota dan jika telah disetujui maka

²⁶Zulkarnain Zulkarnain and Widi Nurdiati, "Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1617–32, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>.

pemerintah desa dapat mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) ini menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini dilakukan apabila program yang telah dibuat telah sah dan telah siap untuk diimplementasikan. Penerapan ADD diatur dalam pasal 81 UU nomor 6 tahun 2014 mengenai desa serta pertaturan pemerintah RI tahun 2016 mengenai desa. Bersumber pada pasal- pasal itu bisa dijabarkan selaku selanjutnya:

- 1) Pemerintah desa dapat menyusun APBDesa dalam penyusunan dana desa.
- 2) Pemerintah desa memakai anggaran desa untuk kebutuhan pembangunan prasarana dengan memakai sumber daya manusia lokal.
- 3) Pemerintah desa memakai anggaran desa guna membiayai aktivitas pemberdayaan warga.
- 4) Penggunaan dana desa untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada diwilayah desa.
- 5) Pemasukan dan pengeluaran anggaran desa yang diperuntukan untuk pelaksanaan APBDesa dikakukan dalam rekeing kas desa.²⁷

²⁷Hulu et al., “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.”

Pelaksanaanya dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanana kegiatan mengajukan pendanaan yang disertai dengan bukti dokume RAB.
 - 2) RAB yang terdapat setelah itu disetujui oleh sekretaris desa yang setelah itu disahkan oleh kepala desa.
 - 3) Eksekutif aktivitas bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran bobot perhitungan.
 - 4) Bersumber pada RAB, instruktur aktivitas mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) pada Kepala Desa.
 - 5) SPP yang telah disetujui akan dilakukan setelah barang/jasa telah diterima/diselesaikan.
 - 6) Dalam pengajuan SPP dibutuhkan beberapa lampiran yakni, surat permintaan pembayaran (SPP), surat pernyataan pertanggung jawab belanja, dan lampira bukti transaksi.
- c. Pengawasan Dan Trasparansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan pelaksanaan APBDesa kepada mantan bupati/walikota melalui camat. Pelaporan dilakukan dalam dua semester, yaitu semester pertama dilaporkan pada akhir Juli dan semester kedua pada akhir Januari. Untuk meyakinkan masyarakat tentang hasil pertanggungjawaban

pengelolaan dana desa, perangkat desa juga harus melibatkan masyarakat yang menjadi tujuan dari program dana desa. Laporan pencapaian dan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan APBD ini kemudian diinformasikan kepada publik.²⁸

B. Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang.²⁹ Indikator keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.³⁰

Banyak kendala-kendala yang menghadang jalannya proses pembangunan yang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya ada sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan ada sebagian

²⁸Zulkarnain and Nurdiati, "Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.", h. 32

²⁹Andi D Zulfikar et al., "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 264–73.

³⁰Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta, 2009), Pustaka Pelajar.

yang belum mendapatkannya.³¹

Pada kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.³² Pembahasan tentang pertumbuhan diantaranya berangkat dari firman Allah swt. pada surah Hud ayat 61:

﴿وَالِىٰ تَمُوذَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya:

"Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah!"

³¹Asiva Noor Rachmayani, *Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*, 2015.

³²Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>.

*Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud/11:61).*³³

Pada terjemahan "Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya", yang memiliki arti jika Allah mengutus manusia di bumi yaitu salah satunya adalah untuk pemakmuran bumi yang dapat dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.³⁴ Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.³⁵

³³Al-Qur'an, Surah Hud [11]: 61

³⁴Ahmed Saied Bamakhrumah, "Economic Development in Islam, Pelanduk Publications, Malaysia:," *Economic Development in Islam, Pelanduk Publications, Malaysia:* 5 (1991): 69–73.

³⁵Tafsir Al-Mawardi, *An-Nukat wa Al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 2, h. 408–409.

2. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi dewasa ini banyak ketergantungan kepada pertumbuhan ekonomi.³⁶ Pembangunan ekonomi Islam lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusianya sekaligus pemberdayaan alam secara lebih mendalam demi untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Ini tidak hanya dapat diraih dengan dapat terpenuhinya kebutuhan materiil saja, namun hal-hal ini juga bisa diwujudkan dari terpenuhinya segala kebutuhan dan persiapan dalam menyongsong kehidupan akhirat.³⁷

Hal tersebut dapat tercipta dengan tercapainya kesejahteraan, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 9 yang menyatakan sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga keturunannya)." (QS. al-Nisa/4:9).³⁸

³⁶Juliana Juliana et al., "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 120–31, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824>.

³⁷D Zulfikar et al., "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam."

³⁸Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 9.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, ada beberapa hal yang dapat kita pahami bahwa sebuah generasi yang lemah mencerminkan sebuah kemiskinan dan bertolak belakang dengan cerminan sebuah kesejahteraan, dan kemiskinan itu tidak akan menghilang begitu saja, namun harus dibarengi dengan kerja keras sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah dan usaha kita untuk terbebas dari jerat kemiskinan.³⁹ Terdapat dasar filosofis dalam Islam yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya, diantaranya:⁴⁰

- 1) Tauhid Rububiyah, yakni proses pernyataan dasar hukum Allah untuk merancang model pembangunan yang berasaskan nilai-nilai Islam.
- 2) Keadilan, yakni meratanya pembangunan ekonomi.
- 3) Khalifah, yaitu manusia- manusia merupakan wakil Allah di muka bumi yang diberi tugas untuk mengelola dan diamanahkan sumber daya alam untuk kemakmuran kemaslahatan umat manusia, bumi, dan segala isinya.
- 4) Tazkiyah, merupakan proses menyucikan manusia-manusia terkait dengan hubungannya dengan Allah, dengan hubungan sesamanya dan hubungannya dengan alam lingkungannya serta masyarakat dan juga negaranya.

³⁹Tafsir Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, pada penafsiran QS An-Nisa' [4]: 9, h, 129

⁴⁰Hasan, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h, 59

Adapun prinsip-prinsip pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam antara lain:⁴¹

- 1) Pembangunan ekonomi merupakan keseimbangan dari berbagai faktor-faktor sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan aktivitas usaha bersifat multidimensional.
- 2) Pada ajaran pertumbuhan Islam, dan pembangunan ekonomi memiliki komprehensif sifat yang serta mengandung unsur-unsur moral, spiritual, dan material.
- 3) Fokus utama pembangunan ialah lingkungan kultural manusia.
- 4) Ajaran Islam menunjukkan bahwa pembangunan lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh lingkungannya.

Beberapa faktor yang akan menentukan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi antara lain:

- 1) Barang Modal

Barang modal memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan peningkatan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga akan sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa adanya alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk menciptakan barang dan jasa itu. Barang modal di sini digunakan untuk memproduksi atau menciptakan output (barang dan jasa).

⁴¹D Zulfikar et al., “Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam.”

2) Teknologi

Keberadaan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi selain dari pada barang-barang modal. Kemajuan teknologi di berbagai negara juga ikut meningkatkan kemajuan ekonominya, karena teknologi mampu menekan pemborosan penggunaan sumber daya alam atau energi pada kegiatan produksi. Di suatu negara yang sementara sangatlah berkembang diperlukan kehadiran teknologi yang tepat guna memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam lingkungannya.⁴²

3. Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang mengarah pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Pembangunan ekonomi terdiri dari tiga ranah yakni melalui pendidikan, kesehatan dan daya beli atau pendapatan masyarakat.

Hal ini dapat melalui peningkatan daya beli masyarakat atau dapat juga diartikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila terdapat lapangan pekerjaan yang dapat menampung kegiatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan jumlah usaha dan peningkatan jenis usaha kesempatan kerja. Dalam hal ini diperlukan perencanaan pembangunan terutama

⁴² Muhammad Hasan and Aziz Muhammad, *1/ Pembangunan Ekonomi*, 2018, http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf.

pada daerah- daerah tertinggal.⁴³ hal ini selaras dengan yang diungkapkan Arif Eko, et.all bahwa pembangunan ekonomi selaku kenaikan pemasukan per jiwa serta laju perkembangan ekonomi ditunjukkan dengan laju perkembangan PDRB (Produk Dalam negeri Bruto) buat tingkatan nasional serta PDRB (Produk Dalam negeri Bruto Wilayah) buat tingkatan wilayah.⁴⁴

C. Infrastruktur Ekonomi

1. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur ialah asset pemerintah yang dibentuk selaku bagian dari jasa kepada warga. Infrastruktur merujuk pada aspek fisik yang sediakan trasportasi, pengairan, drainase, bagun-baguan serta sarana khalayak lain yang diperlukan buat mendukung kehidupan masyarakat dalam area sosial serta ekonomi.⁴⁵

Menurut Rifyal Z.G, dkk, pembangunan infrastruktur ialah salah satu pandangan berarti serta vital buat mempercepat cara pembangunan sesuatu negeri. prasarana pula jadi salah satu mesin perkembangan ekonomi, dimana saat ini indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah dilihat dari tigkat kualitas

⁴³ R Didi Djadjuli, “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8–21, <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>.

⁴⁴ Arif Eko Wahyudi Arfianto and Ahmad Riyadh U Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa,” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 2, no. 1 (2014): 53–66, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.

⁴⁵ Adam Latif et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal MODERAT* 5, no. 1 (2019): 1–15, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.

infrastruktur dari suatu Negara.⁴⁶ Hal inilah yang menjadikan infrastruktur menjadi awal dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengertian Infrastruktur

Pada dasarnya, infrastruktur memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari konteksnya namun demikian, umumnya infrastruktur ini dipahami sebagai suatu produk fisik, seperti: jalan, jaringan drainase, jaringan air minum dan instalasi listrik yang terkait dengan konteks infrastruktur sipil dan perkotaan. Akan tetapi, definisi infrastruktur tidak hanya meliputi pengertian seperti di atas, prosedur operasi serta kebijakan pembangunan juga merupakan salah satu jenis infrastruktur. Pembahasan ini kemudian dikenal istilah Hard Infrastructure dan Soft Infrastructure, yang pada akhirnya kedua jenis infrastruktur ini saling terkait dalam menciptakan layanan infrastruktur secara utuh. Berdasarkan definisi tersebut infrastruktur memiliki cakupan yang lebih luas.⁴⁷

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar

⁴⁶Rifyal Zuhdi Gultom and Annisa Qadariusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 203, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>.

⁴⁷Youdhi Permadi Ma'ruf and Jeluddin Daud, "Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan," *Jurnal Teknik Sipil USU* 2, no. 3 (2013): 1–12,

perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.⁴⁸

Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam

⁴⁸MSP Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397>.

lingkup sosial dan ekonomi.⁴⁹

Infrastruktur berperan penting dalam mempromosikan dan mempertahankan pertumbuhan. Infrastruktur yang dirancang dengan baik juga bisa membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan berbagi manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat miskin, terutama dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dan negara-negara kecil ke pusat-pusat bisnis utama.

Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen publik untuk fungsi pemerintah sebagai kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Grigg, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur diperlukan

⁴⁹Latif et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." h. 6.

koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna. Serangkaian konsep yang disebutkan dengan berbagai teori, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu proses keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha/kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.⁵⁰

Di Indonesia yang memiliki kawasan hutan lindung haruslah memiliki konsep pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa perhitungan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Tentunya ini perlu dipertimbangkan karena setiap pembangunan infrastruktur selalu berdampak pada lingkungan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ; 11-12 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

⁵⁰Latif et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." h. 6.

Artinya:

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al-Baqarah /2: ; 11-12)⁵¹”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya manusia haruslah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, rawat dan ita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat.⁵²

3. Macam-Macam Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi terdiri dari berbagai jenis sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi, antara lain:

a. Infrastruktur Transportasi

Meliputi jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Menurut **Kuncoro (2010)**, infrastruktur transportasi berperan penting dalam memperlancar mobilitas barang dan jasa serta memperluas jangkauan pasar, terutama di wilayah pedesaan.

⁵¹Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 11–12

⁵²Tafsir Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 14, pada tafsir QS Ibrahim [14]: 7, h.

b. Infrastruktur Energi

Meliputi listrik dan sumber energi lainnya. **Jhingan (2012)** menyatakan bahwa ketersediaan energi yang stabil sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung kegiatan industri maupun usaha kecil masyarakat.

c. Infrastruktur Pasar dan Perdagangan

Meliputi pasar tradisional dan fasilitas distribusi. Menurut **Arsyad (2010)**, keberadaan pasar sebagai infrastruktur ekonomi berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mempertemukan produsen dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air

Berfungsi menunjang sektor pertanian. **Mubyarto (2004)** menegaskan bahwa sistem irigasi yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.

e. Infrastruktur Komunikasi

Meliputi sarana komunikasi dan informasi. Menurut **Todaro dan Smith (2011)**, akses komunikasi yang baik dapat mempercepat arus informasi ekonomi dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan usaha.

4. Fungsi Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Memperlancar proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
2. Menurunkan biaya produksi dan biaya transportasi.
3. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
4. Membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
5. Mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah

Fungsi tersebut sejalan dengan pendapat **Sukirno (2013)** yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

5. Peran Infrastruktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

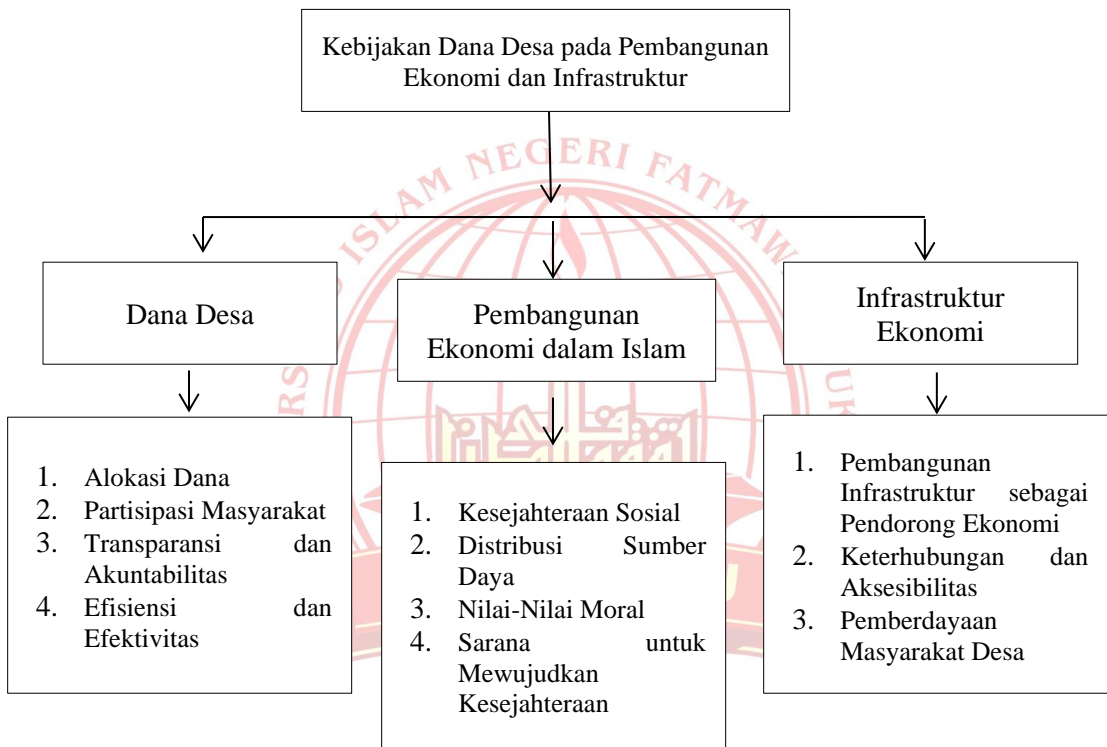
Pembangunan infrastruktur ekonomi memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut **Todaro dan Smith (2011)**, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi dan layanan dasar. Infrastruktur ekonomi yang baik memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Untuk menyusun kerangka berpikir dari teori Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dalam Islam, dan Infrastruktur Ekonomi, kita perlu menghubungkan ketiga konsep tersebut secara logis dan terstruktur. Berikut adalah penjelasan kerangka berpikir yang menghubungkan ketiganya dalam konteks penelitian mengenai

dampak kebijakan Dana Desa pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur:

1. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di desa dengan memberikan anggaran langsung kepada desa. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal, yang mencakup pembangunan fisik dan non-fisik. Berdasarkan teori kebijakan publik, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Poin Utama dari Teori Dana Desa:

- a. Alokasi Dana: Pemerintah mengalokasikan dana kepada desa untuk mendanai program pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa.
- b. Partisipasi Masyarakat: Dana Desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, agar pembangunan lebih tepat sasaran.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan Dana Desa adalah adanya transparansi dalam penggunaannya dan akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintah.

- d. Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan Dana Desa haruslah efisien dan efektif untuk menghasilkan hasil yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Pembangunan ekonomi dalam Islam mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan keadilan sosial. Poin Utama dari Pembangunan Ekonomi dalam Islam:

- a. Kesejahteraan Sosial: Islam menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
- b. Distribusi Sumber Daya: Islam mengajarkan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk mengurangi ketimpangan antara individu dan kelompok.
- c. Bergantung pada Nilai-Nilai Moral: Ekonomi dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip etika yang tinggi, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
- d. Sarana untuk Mewujudkan Kesejahteraan: Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya terbatas pada sektor materi,

tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup spiritual dan moral masyarakat.

3. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mencakup fasilitas fisik dan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pasar, dan fasilitas lainnya yang memfasilitasi proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Poin Utama dari Infrastruktur Ekonomi:

- a. Pembangunan Infrastruktur sebagai Pendorong Ekonomi: Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses ke pasar, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan mobilitas barang dan orang.
- b. Keterhubungan dan Aksesibilitas: Infrastruktur yang baik menciptakan keterhubungan antar wilayah, yang penting dalam memperlancar aliran barang dan jasa.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran akan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Kerangka berpikir ini menghubungkan teori Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dalam Islam, dan Infrastruktur Ekonomi dengan menyatakan bahwa Dana Desa, jika dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa tidak hanya

berfokus pada aspek fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sosial dan spiritual masyarakat desa.

